



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pelaksana teknis operasional bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Formal adalah satuan pendidikan formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
10. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Klaten.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Klaten.
12. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
 - a. SPF SD Negeri;
 - b. SPF SMP Negeri.
- (2) SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) SPF merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan formal.
- (2) SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD yang dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPF yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara teknis melalui Kepala Bidang terkait, dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SPF terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPF.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi SPF SD Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan bagan Organisasi SPF SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (5) Daftar Nama SPF SD Negeri di Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Daftar Nama SPF SMP Negeri di Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

SPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SPF menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan disekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah;
- d. pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. pembinaan kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala SPF SD Negeri

Pasal 7

- (1) Kepala SPF SD Negeri mempunyai tugas sebagai pendidik, pemimpin, pelaksana administrasi dan pengawasan pada SPF masing-masing.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien;

- b. mengatur kegiatan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi induk;
- c. mengatur kurikulum, administrasi dan tata usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pengawasan kegiatan belajar mengajar, ketatausahaan dan sarana prasarana serta kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala SPF SMP Negeri

Pasal 8

- (1) Kepala SPF SMP Negeri mempunyai tugas pendidik, pemimpin, pelaksana administrasi dan pengawasan pada SPF masing-masing.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien;
 - b. mengatur kegiatan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi induk;
 - c. mengatur kurikulum, administrasi dan tata usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pengawasan kegiatan belajar mengajar, ketatausahaan dan sarana prasarana serta kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Di Kecamatan dibentuk Koordinator wilayah Kecamatan di bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan di bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Negeri Sipil

lainnya yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan.

- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan di bidang pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara teknis melalui Kepala Bidang terkait, dan secara administrasi melalui Sekretaris.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan di bidang pendidikan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sarana dan prasarana serta Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan di bidang pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SPF SD Negeri dan SPNF.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data SPF SD Negeri dan SPNF;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan kepegawaian, keuangan, aset dan urusan ketatausahaan SPF SD Negeri dan SPNF;
 - c. mengkoordinasikan tugas dan memberi petunjuk kepada tenaga administrasi dan fungsional lain di wilayah kerja masing-masing;
 - d. membuat melaporkan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi;
 - e. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. memberikan pertimbangan nilai Sasaran Kinerja Pegawai di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala merupakan jabatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPF.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 16

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

Pasal 17

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Kepala melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Februari 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

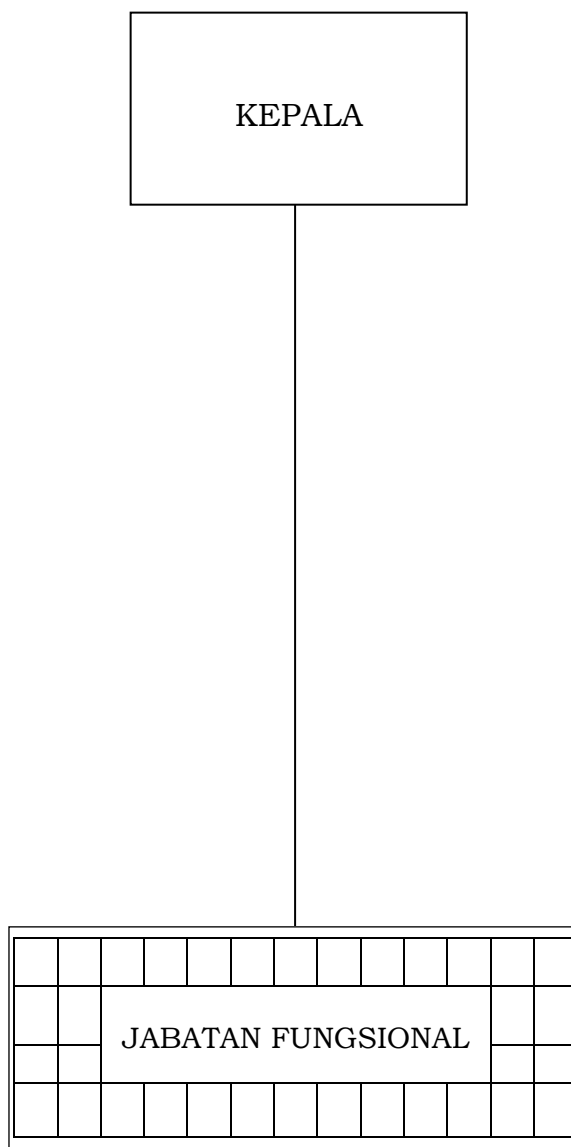
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 4

BAGAN ORGANISASI SATUAN SPNF SD
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

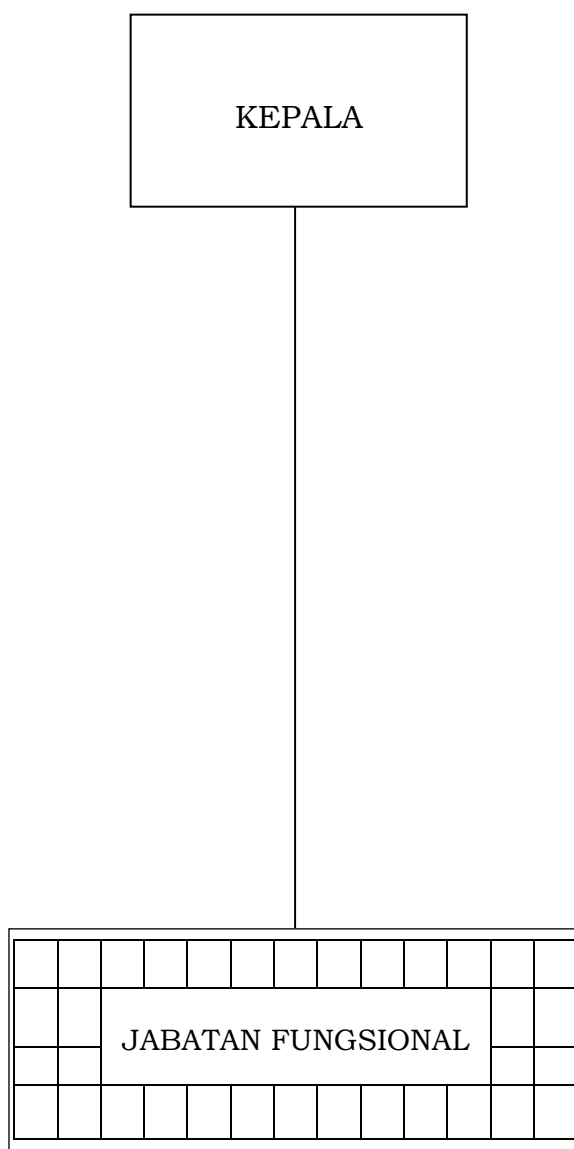


Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

BAGAN ORGANISASI SATUAN SPNF SMP
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN



Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

DAFTAR NAMA SPF SD NEGERI
DI KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA SPF SD NEGERI DI KABUPATEN KLATEN

NO	KECAMATAN	NAMA SPF SD NEGERI
1.	Prambanan	1. SD N 1 Taji 2. SD N 1 Brajan 3. SD N 1 Bugisan 4. SD N 1 Cucukan 5. SD N 1 Joho 6. SD N 1 Kebondalem Kidul 7. SD N 1 Kebondalem Lor 8. SD N 1 Kemudo 9. SD N 1 Kokosan 10. SD N 1 Pandansimping 11. SD N 1 Prambanan 12. SD N 1 Randusari 13. SD N 1 Sanggrahan 14. SD N 1 Sengon 15. SD N 2 Brajan 16. SD N 2 Bugisan 17. SD N 2 Cucukan 18. SD N 2 Joho 19. SD N 2 Kebon Dalem Lor 20. SD N 2 Kebondalem Kidul 21. SD N 2 Kokosan 22. SD N 2 Pandansimping 23. SD N 2 Prambanan 24. SD N 2 Randusari 25. SD N 2 Sanggrahan 26. SD N 2 Taji 27. SD N 3 Kemudo 28. SD N 3 Prambanan 29. SD N 3 Sengon 30. SD N Kotesan 31. SD N Pereng

2.	Gantiwarno	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Baturan 2. SD N 1 Jabung 3. SD N 1 karangturi 4. SD N 1 Kragilan 5. SD N 1 Mlese 6. SD N 1 Muruh 7. SD N 1 Ngandong 8. SD N 1 Sawit 9. SD N 1 Towangsan 10. SD N 2 Ceporan 11. SD N 2 Jabung 12. SD N 2 Karangturi 13. SD N 2 Katekan 14. SD N 2 Kragilan 15. SD N 2 Mlese 16. SD N 2 Muruh 17. SD N 2 Ngandong 18. SD N 2 Sawit 19. SD N Gentan 20. SD N Gesikan 21. SD N Jogoprayan 22. SD N Kerten 23. SD N Mutihan
3.	Wedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Brangkal 2. SD N 1 Canan 3. SD N 1 Dengkeng 4. SD N 1 Kadibolo 5. SD N 1 Kadilanggon 6. SD N 1 Kaligayam 7. SD N 1 Kalitengah 8. SD N 1 Melikan 9. SD N 1 Pasung 10. SD N 1 Pesu 11. SD N 1 Sembung 12. SD N 1 Sukorejo 13. SD N 1 Tanjungan 14. SD N 1 Trotok 15. SD N 2 Birit 16. SD N 2 Brangkal 17. SD N 2 Canan 18. SD N 2 Kaligayam 19. SD N 2 Kalitengah 20. SD N 2 Melikan 21. SD N 2 Pasung 22. SD N 2 Sukorejo 23. SD N 3 Kaligayam 24. SD N Gadungan 25. SD N Jiwo 26. SD N Karang Wedi 27. SD N Pacing 28. SD N Pandes
4.	Bayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Banyuripan 2. SD N 1 Beluk

		<ol style="list-style-type: none"> 3. SD N 1 Dukuh 4. SD N 1 Gununggajah 5. SD N 1 Jarum 6. SD N 1 Jotangan 7. SD N 1 Kebon 8. SD N 1 Krakitan 9. SD N 1 Ngerangan 10. SD N 1 Paseban 11. SD N 1 Talang 12. SD N 1 Tawangrejo 13. SD N 1 Tegalrejo 14. SD N 1 Wiro 15. SD N 2 Banyuripan 16. SD N 2 Dukuh 17. SD N 2 Gununggajah 18. SD N 2 Jambakan 19. SD N 2 Jarum 20. SD N 2 Jotangan 21. SD N 2 Kebon 22. SD N 2 Krakitan 23. SD N 2 Krikilan 24. SD N 2 Ngerangan 25. SD N 2 Tawangrejo 26. SD N 2 Tegalrejo 27. SD N 2 Wiro 28. SD N 3 Jambakan 29. SD N 3 krakitan 30. SD N 3 Ngerangan 31. SD N 3 Paseban 32. SD N 4 Wiro 33. SD N Bogem 34. SD N Nengahan
5.	Cawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD N Balak 2. SD N 1 Barepan 3. SD N 1 Bawak 4. SD N 1 Bogor 5. SD N 1 Burikan 6. SD N 1 Cawas 7. SD N 1 Gombang 8. SD N 1 Japanan 9. SD N 1 Karangasem 10. SD N 1 Kedungampel 11. SD N 1 Mlese 12. SD N 1 Nanggulan 13. SD N 1 Pakisari 14. SD N 1 Tirtomarto 15. SD N 1 Tlingsing 16. SD N 1 Tugu 17. SD N 2 Baran 18. SD N 2 Barepan 19. SD N 2 Bawak 20. SD N 2 Bogor 21. SD N 2 Burikan 22. SD N 2 Cawas

		23. SD N 2 Gombang 24. SD N 2 Japanan 25. SD N 2 Karangasem 26. SD N 2 Kedungampel 27. SD N 2 Mlese 28. SD N 2 Nanggulan 29. SD N 2 Pakisari 30. SD N 2 Plosowangi 31. SD N 2 Pogung 32. SD N 2 Tugu 33. SD N 3 Cawas 34. SD N 3 Gombang 35. SD N 3 Karangasem 36. SD N 3 Nanggulan 37. SD N 3 Pakisari 38. SD N 3 Tlingsing 39. SD N Bendungan
6.	Trucuk	1. SD N 1 Bero 2. SD N 1 Gaden 3. SD N 1 Jatipuro 4. SD N 1 Kalikebo 5. SD N 1 Karangpakel 6. SD N 1 Mandong 7. SD N 1 Mireng 8. SD N 1 Planggu 9. SD N 1 Sabranglor 10. SD N 1 Sajen 11. SD N 1 Trucuk 12. SD N 1 Wanglu 13. SD N 1 Wonosari 14. SD N 2 Bero 15. SD N 2 Gaden 16. SD N 2 Jatipuro 17. SD N 2 Kalikebo 18. SD N 2 Karangpakel 19. SD N 2 Mandong 20. SD N 2 Mireng 21. SD N 2 Palar 22. SD N 2 Planggu 23. SD N 2 Puluhan 24. SD N 2 Pundungsari 25. SD N 2 Sabranglor 26. SD N 2 Sumber 27. SD N 2 Trucuk 28. SD N 2 Wanglu 29. SD N 2 Wonosari 30. SD N 3 Bero 31. SD N 3 Gaden 32. SD N 3 Kalikebo 33. SD N 3 Karangpakel 34. SD N 3 Palar 35. SD N 3 Puluhan 36. SD N 3 Pundungsari 37. SD N 3 Sajen

		38. SD N 4 Kalikebo 39. SD N Kradenan
7.	Kebonarum	1. SD N 1 Gondang 2. SD N 1 Karangduren 3. SD N 1 Malangjiwan 4. SD N 1 Menden 5. SD N 1 Ngrundul 6. SD N 1 Pluneng 7. SD N 2 Gondang 8. SD N 2 Karangduren 9. SD N 2 Ngrundul 10. SD N 2 Pluneng 11. SD N Basin
8.	Jogonalan	1. SD N 1 Bakung 2. SD N 1 Dompnyongan 3. SD N 1 Granting 4. SD N 1 Joton 5. SD N 1 Kraguman 6. SD N 1 Ngering 7. SD N 1 Rejoso 8. SD N 1 Somopuro 9. SD N 1 Wonoboyo 10. SD N 2 Dompnyongan 11. SD N 2 Kraguman 12. SD N 2 Ngering 13. SD N 2 Rejoso 14. SD N 2 Tambakan 15. SD N 2 Wonoboyo 16. SD N 3 Joton 17. SD N 3 Somopuro 18. SD N 3 Tambakan 19. SD N Gondangan 20. SD N Karangdukuh 21. SD N Pakahan 22. SD N Plawikan 23. SD N Prawatan Jogonalan 24. SD N Sumpyang 25. SD N Tangkisan Pos 26. SD N Titang
9.	Manisrenggo	1. SD N 1 Barukan 2. SD N 1 Borangan 3. SD N 1 Kecemen 4. SD N 1 Kepurun 5. SD N 1 Nangsri 6. SD N 1 Ngemplak Seneng 7. SD N 1 Solodiran 8. SD N 1 Sukorini 9. SD N 1 Taskombang 10. SD N 1 Tijayan 11. SD N 2 Barukan 12. SD N 2 Borangan 13. SD N 2 Kecemen 14. SD N 2 Kepurun

		<ul style="list-style-type: none"> 15. SD N 2 Leses 16. SD N 2 Nangsri 17. SD N 2 Ngemplak Seneng 18. SD N 2 Solodiran 19. SD N 2 Sukorini 20. SD N 2 Taskombang 21. SD N 2 Tijayan 22. SD N 3 Nangsri 23. SD N 3 Taskombang 24. SD N Bendan 25. SD N Kebonallas 26. SD N Kranggan 27. SD N Sapen 28. SD N Tanjungsari
10.	Karangnongko	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Blimbing 2. SD N 1 Demak Ijo 3. SD N 1 Gumul 4. SD N 1 Jagalan 5. SD N 1 Jiwan 6. SD N 1 Kadilajo 7. SD N 1 Kanoman 8. SD N 1 Karangnongko 9. SD N 1 Logede 10. SD N 1 Somokaton 11. SD N 2 Blimbing 12. SD N 2 Gumul 13. SD N 2 Jagalan 14. SD N 2 Jiwan 15. SD N 2 Kadilajo 16. SD N 2 Kanoman 17. SD N 2 Karangnongko 18. SD N 2 Logede 19. SD N 2 Somokaton 20. SD N 3 Gumul 21. SD N 4 Gumul 22. SD N Banyuaeng 23. SD N Gemampir 24. SD N Jetis 25. SD N Ngemplak
11.	Ceper	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Ceper 2. SD N 1 Cetan 3. SD N 1 Jambukidul 4. SD N 1 jambukulon 5. SD N 1 Kajen 6. SD N 1 Klepu 7. SD N 1 Kujon 8. SD N 1 Kuncen 9. SD N 1 Kurung 10. SD N 1 Meger 11. SD N 1 Ngawonggo 12. SD N 1 Pasungan 13. SD N 1 Pokak 14. SD N 1 Srebegan

		<ul style="list-style-type: none"> 15. SD N 2 Ceper 16. SD N 2 Dlimas 17. SD N 2 Jambukidul 18. SD N 2 Jambukulon 19. SD N 2 Kajen 20. SD N 2 Klepu 21. SD N 2 Ngawonggo 22. SD N 2 Pokak 23. SD N 3 Ceper 24. SD N 3 Dlimas 25. SD N 3 Klepu 26. SD N 3 Kujon 27. SD N 3 Kuncen 28. SD N Jombor 29. SD N Mlese 30. SD N Tegalrejo
12.	Pedan	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Bendo 2. SD N 1 Jetiswetan 3. SD N 1 Keden 4. SD N 1 Kedungan 5. SD N 1 Ngaren 6. SD N 1 Sobayan 7. SD N 1 Tambakboyo 8. SD N 1 Temuwangi 9. SD N 1 Troketon 10. SD N 2 Beji 11. SD N 2 Bendo 12. SD N 2 Jetiswetan 13. SD N 2 Kalangan 14. SD N 2 Kaligawe 15. SD N 2 Keden 16. SD N 2 Lemahireng 17. SD N 2 Ngaren 18. SD N 2 Tambakboyo 19. SD N 2 Temuwangi 20. SD N 2 Troketon 21. SD N 3 Kalangan 22. SD N 3 Keden 23. SD N 3 Sobayan 24. SD N Jatimulyo
13.	Karangdowo	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Babadan 2. SD N 1 Bakungan 3. SD N 1 Demangan 4. SD N 1 Karangjoho 5. SD N 1 Kupang 6. SD N 1 Munggung 7. SD N 1 Ngolodono 8. SD N 1 Pugeran 9. SD N 1 Ringinputih 10. SD N 1 Sentono 11. SD N 1 Soka 12. SD N 1 Tulas 13. SD N 1 Tumpukan

		14. SD N 2 Bulusan 15. SD N 2 Demangan 16. SD N 2 Karangdowo 17. SD N 2 Karangtalun 18. SD N 2 Kupang 19. SD N 2 Ngolodono 20. SD N 2 Pugeran 21. SD N 2 Ringinputih 22. SD N 2 Tambak 23. SD N 2 Tumpukan 24. SD N 3 Bulusan 25. SD N 3 Demangan 26. SD N 3 Karangdowo 27. SD N 3 Karangwungu 28. SD N 3 Munggung 29. SD N 3 Ringinputih 30. SD N Tegalampel
14.	Juwiring	1. SD N 1 Carikan 2. SD N 1 Bulurejo 3. SD N 1 Gondangsari 4. SD N 1 Jetis 5. SD N 1 Juwiran 6. SD N 1 Kwarasan 7. SD N 1 Sawahan 8. SD N 1 Serenan 9. SD N 1 Taji 10. SD N 1 Tanjung 11. SD N 1 Terasan 12. SD N 1 Tlogorandu 13. SD N 2 Bolopleret 14. SD N 2 Bulurejo 15. SD N 2 Carikan 16. SD N 2 Gondangsari 17. SD N 2 Jaten 18. SD N 2 Juwiran 19. SD N 2 Ketitang 20. SD N 2 Sawahan 21. SD N 2 Serenan 22. SD N 2 Taji 23. SD N 2 Tanjung 24. SD N 2 Terasan 25. SD N 2 Tlogorandu 26. SD N 3 Kwarasan 27. SD N 3 Serenan 28. SD N 3 Tanjung 29. SD N 4 Terasan 30. SD N Juwiring 31. SD N Kenaiban 32. SD N Mrisen 33. SD N Pundungan
15.	Wonosari	1. SD N 1 Bener 2. SD N 1 Bentangan 3. SD N 1 Bolali

		<ol style="list-style-type: none"> 4. SD N 1 Boto 5. SD N 1 Duwet 6. SD N 1 Gunting 7. SD N 1 Jelobo 8. SD N 1 Kingkang 9. SD N 1 Lumbungkerep 10. SD N 1 Ngreden 11. SD N 1 Sidowarno 12. SD N 1 Tegalgondo 13. SD N 1 Teloyo 14. SD N 1 Wadunggetas 15. SD N 2 Bener 16. SD N 2 Bentangan 17. SD N 2 Bulan 18. SD N 2 Gunting 19. SD N 2 Lumbungkerep 20. SD N 2 Ngreden 21. SD N 2 Sidowarno 22. SD N 2 Teloyo 23. SD N 2 Wadunggetas 24. SD N 3 Bentangan 25. SD N 3 Boto 26. SD N 3 Duwet 27. SD N 3 Gunting 28. SD N 3 Jelobo 29. SD N 3 Kingkang 30. SD N 3 Ngreden 31. SD N 3 Sidowarno 32. SD N 3 Tegalgondo 33. SD N 3 Teloyo 34. SD N 3 Wadunggetas 35. SD N 4 Jelobo 36. SD N Pandanan 37. SD N Sekaran 38. SD N Sukorejo
16.	Delanggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Bowan 2. SD N 1 Delanggu 3. SD N 1 Dukuh 4. SD N 1 Gatak 5. SD N 1 Jetis 6. SD N 1 Kepanjen 7. SD N 1 Krecek 8. SD N 1 Mendak 9. SD N 1 Segaran 10. SD N 1 Sidomulyo 11. SD N 1 Sribit 12. SD N 1 Tlobong 13. SD N 2 Banaran 14. SD N 2 Bowan 15. SD N 2 Butuhan 16. SD N 2 Delanggu 17. SD N 2 Gatak 18. SD N 2 Kepanjen 19. SD N 2 Segaran

		20. SD N 2 Sribit 21. SD N 2 Tlobong 22. SD N 3 Delanggu 23. SD N 6 Delanggu 24. SD N Karang 25. SD N Sabrang
17.	Polanharjo	1. SD N 1 Borongan 2. SD N 1 Glagahwangi 3. SD N 1 Kahuman 4. SD N 1 Kapungan 5. SD N 1 Karanglo 6. SD N 1 Keprabon 7. SD N 1 Kranggan 8. SD N 1 Ngaran 9. SD N 1 Polan 10. SD N 1 Sidowayah 11. SD N 2 Borongan 12. SD N 2 Glagahwangi 13. SD N 2 Kapungan 14. SD N 2 Karanglo 15. SD N 2 Keprabon 16. SD N 2 Ngaran 17. SD N 2 Polan 18. SD N 2 Sidoharjo 19. SD N 2 Sidowayah 20. SD N 3 Glagahwangi 21. SD N 3 Kahuman 22. SD N Janti 23. SD N Jimus 24. SD N Kebonharjo 25. SD N Nganjat 26. SD N Ponggok 27. SD N Turus 28. SD N Wangen
18.	Karanganom	1. SD N 1 Blanceran 2. SD N 1 Brangkal 3. SD N 1 Gempol 4. SD N 1 Jambeyan 5. SD N 1 Jungkare 6. SD N 1 Jurangjero 7. SD N 1 Kadirejo 8. SD N 1 Kunden 9. SD N 1 Padas 10. SD N 1 Soropaten 11. SD N 1 Troso 12. SD N 2 Brangkal 13. SD N 2 Gledek 14. SD N 2 Jambeyan 15. SD N 2 Jurangjero 16. SD N 2 Karang 17. SD N 2 Karanganom 18. SD N 2 Kunden 19. SD N 2 Ngabeyan

		20. SD N 2 Soropaten 21. SD N 2 Tarubasan 22. SD N 3 Gempol 23. SD N 3 Tarubasan 24. SD N Beku 25. SD N Jeblog 26. SD N Ponggok
19.	Tulung	1. SD N 1 Bana 2. SD N 1 Cokro 3. SD N 1 Dalangan 4. SD N 1 Daleman 5. SD N 1 Gedongjetis 6. SD N 1 Kiringan 7. SD N 1 Majegan 8. SD N 1 Malangan 9. SD N 1 Mundu 10. SD N 1 Pomah 11. SD N 1 Pucang 12. SD N 1 Sedayu 13. SD N 1 Sorogaten 14. SD N 1 Sudimoro 15. SD N 1 Tulung 16. SD N 2 Beji 17. SD N 2 Dalangan 18. SD N 2 Daleman 19. SD N 2 Gedongjetis 20. SD N 2 Kemiri 21. SD N 2 Kiringan 22. SD N 2 Majegan 23. SD N 2 Pomah 24. SD N 2 Pucang 25. SD N 2 Sedayu 26. SD N 2 Sorogaten 27. SD N 2 Tulung 28. SD N 3 Majegan 29. SD N Wunut
20.	Jatinom	1. SD N 1 Bandungan 2. SD N 1 Bengking 3. SD N 1 Beteng 4. SD N 1 Bonyokan 5. SD N 1 Gedaren 6. SD N 1 Glagah 7. SD N 1 Jemawan 8. SD N 1 Kayumas 9. SD N 1 Krajan 10. SD N 1 Mranggen 11. SD N 1 Pandeyan 12. SD N 1 Puluhan 13. SD N 1 Randulanang 14. SD N 1 Socokangsi 15. SD N 1 Temuireng 16. SD N 1 Tibayan 17. SD N 2 Bandungan

		18. SD N 2 Bengking 19. SD N 2 Beteng 20. SD N 2 Bonyokan 21. SD N 2 Gedaren 22. SD N 2 Glagah 23. SD N 2 Kayumas 24. SD N 2 Krajan 25. SD N 2 Mranggen 26. SD N 2 Pandeyan 27. SD N 2 Randulanang 28. SD N 2 Socokangsi 29. SD N 2 Temuireng 30. SD N 2 Tibayan 31. SD N 3 Glagah 32. SD N 3 Krajan 33. SD N 3 Socokangsi 34. SD N Cawan 35. SD N Jatinom
21.	Kemalang	1. SD N 1 Balerante 2. SD N 1 Bawukan 3. SD N 1 Bumiharjo 4. SD N 1 Dompol 5. SD N 1 Kemalang 6. SD N 1 Kendalsari 7. SD N 1 Keputran 8. SD N 1 Panggang 9. SD N 1 Sidorejo 10. SD N 1 Talun 11. SD N 1 Tangkil 12. SD N 1 Tegalmulyo 13. SD N 1 Tlogowatu 14. SD N 2 Bawukan 15. SD N 2 Dompol 16. SD N 2 Kendalsari 17. SD N 2 Keputran 18. SD N 2 Sidorejo 19. SD N 2 Talun 20. SD N 2 Tangkil 21. SD N 2 Tegalmulyo 22. SD N 2 Tlogowatu 23. SD N 3 Kemalang 24. SD N 3 Keputran 25. SD N 3 Tlogowatu
22.	Ngawen	1. SD N 1 Candirejo 2. SD N 1 Drono 3. SD N 1 Duwet 4. SD N 1 Gatak 5. SD N 1 Kwaren 6. SD N 1 Manjung 7. SD N 1 Mayungan 8. SD N 1 Ngawen 9. SD N 1 Pepe 10. SD N 1 Senden

		<ul style="list-style-type: none"> 11. SD N 1 Tempursari 12. SD N 2 Candirejo 13. SD N 2 Drono 14. SD N 2 Gatak 15. SD N 2 Kwaren 16. SD N 2 Manjung 17. SD N 2 Manjungan 18. SD N 2 Mayungan 19. SD N 2 Ngawen 20. SD N 2 Tempursari 21. SD N 3 Drono 22. SD N 3 Senden 23. SD N Kahuman
23.	Kalikotes	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Gemblegan 2. SD N 1 Jimbung 3. SD N 1 Jogosetran 4. SD N 1 Kalikotes 5. SD N 1 Krajan 6. SD N 1 Ngemplak 7. SD N 1 Tambongwetan 8. SD N 2 Gemblegan 9. SD N 2 Jimbung 10. SD N 2 Jogosetran 11. SD N 2 Kalikotes 12. SD N 2 Krajan 13. SD N 2 Ngemplak 14. SD N 2 Tambongwetan 15. SD N 3 Gemblegan 16. SD N 3 Jimbung 17. SD N 3 Jogosetran 18. SD N 3 Kalikotes 19. SD N 4 Jimbung 20. SD N 5 Jimbung 21. SD N 6 Jimbung
24.	Klaten Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Barenglor 2. SD N 1 Gergunung 3. SD N 1 Jebugan 4. SD N 1 Jonggrangan 5. SD N 1 Karanganom 6. SD N 2 Barenglor 7. SD N 2 Belangwetan 8. SD N 2 Gergunung 9. SD N 2 Jonggrangan 10. SD N 2 Ketandan 11. SD N 3 Barenglor 12. SD N 3 Karanganom 13. SD N 3 Ketandan 14. SD N 4 Barenglor
25.	Klaten Tengah	<ul style="list-style-type: none"> 1. SD N 1 Bareng 2. SD N 1 Buntalan 3. SD N 1 Jomboran 4. SD N 1 Klaten

		5. SD N 1 Mojayan 6. SD N 1 Semangkak 7. SD N 1 Tonggalan 8. SD N 2 Bareng 9. SD N 2 Gumulan 10. SD N 2 Jomboran 11. SD N 2 Klaten 12. SD N 2 Mojayan 13. SD N 2 Semangkak 14. SD N 3 Buntalan 15. SD N 3 Gumulan 16. SD N 3 Jomboran 17. SD N 3 Klaten 18. SD N 3 Mojayan 19. SD N 4 Klaten 20. SD N Kabupaten
26.	Klaten Selatan	1. SD N 1 Danguran 2. SD N 1 Glodogan 3. SD N 1 Jetis 4. SD N 1 Karanglo 5. SD N 1 Ngalas 6. SD N 1 Nglinggi 7. SD N 1 Sumberejo 8. SD N 1 Tegalyoso 9. SD N 2 Danguran 10. SD N 2 Gayamprit 11. SD N 2 Glodogan 12. SD N 2 Kajoran 13. SD N 2 Karanglo 14. SD N 2 Merbung 15. SD N 2 Ngalas 16. SD N 2 Nglinggi 17. SD N 2 Sumberejo 18. SD N 2 Tegalyoso 19. SD N 2 Trunuh 20. SD N 3 Glodogan

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

DAFTAR NAMA SPF SMP NEGERI
DI KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA SPF SMP NEGERI DI KABUPATEN KLATEN

NO	KECAMATAN	NAMA SPF SMP NEGERI
1.	Prambanan	1. SMP N 1 Prambanan 2. SMP N 2 Prambanan
2.	Gantiwarno	1. SMP N 1 Gantiwarno 2. SMP N 2 Gantiwarno 3. SMP N 3 Gantiwarno
3.	Wedi	1. SMP N 1 Wedi 2. SMP N 2 Wedi
4.	Bayat	1. SMP N 1 Bayat 2. SMP N 2 Bayat 3. SMP N 3 Bayat
5.	Cawas	1. SMP N 1 Cawas 2. SMP N 2 Cawas 3. SMP N 3 Cawas
6.	Trucuk	1. SMP N 1 Trucuk 2. SMP N 2 Trucuk 3. SMP N 3 Trucuk
7.	Kebonarum	1. SMP N 1 Kebonarum
8.	Jogonalan	1. SMP N 1 Jogonalan 2. SMP N 2 Jogonalan
9.	Manisrenggo	1. SMP N 1 Manisrenggo 2. SMP N 2 Manisrenggo 3. SMP N 3 Manisrenggo
10.	Karangnongko	1. SMP N 1 Karangnongko 2. SMP N 2 Karangnongko

11.	Ceper	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Ceper 2. SMP N 2 Ceper 3. SMP N 3 Ceper
12.	Pedan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Pedan 2. SMP N 2 Pedan 3. SMP N 3 Pedan
13.	Karangdowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Karangdowo 2. SMP N 2 Karangdowo 3. SMP N 3 Karangdowo
14.	Juwiring	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Juwiring 2. SMP N 2 Juwiring
15.	Wonosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Wonosari 2. SMP N 2 Wonosari
16.	Delanggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Delanggu 2. SMP N 2 Delanggu 3. SMP N 3 Delanggu 4. SMP N 4 Delanggu
17.	Polanharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Polanharjo 2. SMP N 2 Polanharjo 3. SMP N 3 Polanharjo
18.	Karanganom	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Karanganom 2. SMP N 2 Karanganom 3. SMP N 3 Karanganom 4. SMP N 4 Karanganom
19.	Tulung	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Tulung 2. SMP N 2 Tulung 3. SMP N 3 Tulung
20.	Jatinom	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Jatinom 2. SMP N 2 Jatinom 3. SMP N 3 Jatinom
21.	Kemalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Kemalang 2. SMP N 2 Kemalang
22.	Ngawen	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Ngawen
23.	Kalikotes	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Kalikotes
24.	Klaten Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP N 1 Klaten 2. SMP N 4 Klaten 3. SMP N 6 Klaten

25.	Klaten Tengah	1. SMP N 2 Klaten 2. SMP N 3 Klaten 3. SMP N 5 Klaten
26.	Klaten Selatan	1. SMP N 7 Klaten

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001